Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
UAKPA
005.05.578851
Untuk Periode yang Berakhir
30 Juni 2024

Jl. Prof. Moh. Yamin. No. 52

Palu, Sulawesi Tengah 94231

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palu, 23 Juli 2024
Sekretaris,

Hj. Sitti Junaedah, SE.
NIP. 19670712 199203 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Pernyataan Tanggung Jawab		iv
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	1
II.	Neraca	1
III.	Laporan Operasional	2
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	2
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	3
	A. Penjelasan Umum	9
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	52
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	66
VI.	Lampiran dan Daftar	

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Moh. Yamin Nomor 52 Palu Sulawesi Tengah 94121

e-mail : ptun.palu@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tingkat UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 23 Juli 2024
Sekretaris,

Hj. Sitti Junaedah, SE.
NIP. 19670712 199203 2 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni T.A 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.19.625.000,- atau mencapai 63 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.31.177.000,-. Realisasi Belanja Negara pada Semester I T.A 2024 adalah sebesar Rp.19.295.000,- atau mencapai 37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.51.910.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 75.296.000,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.75.296.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.75.296.000,- dan Rp.0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.19.625.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.19.295.000,- sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (330.000),-. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp. (330.000,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0 ditambah Surplus-LO sebesar Rp.330.000,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp.(330.000),- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. (0,-).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI TA 2024		% thd Angg	2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	31.177.000	19.625.000	62,95	13.453.500
JUMLAH PENDAPATAN		**31.177.000**	**19.625.000**	**62,95**	**13.453.500**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Barang	B.4	51.910.000	19.295.000	37,17	16.800.000
Belanja Modal	B.5	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA		**51.910.000**	**19.295.000**	37,17	**16.800.000**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SMT.I 2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	2.595.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	72.701.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan belum diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		75.296.000	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**75.296.000**	**-**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	2.595.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	72.701.000	-
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		75.296.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		75.296.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**75.296.000**	**-**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	19.625.000	13.453.500
JUMLAH PENDAPATAN		**19.625.000**	**13.453.500**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	19.295.000	19.600.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan	D.6	-	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**19.295.000**	19.600.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		330.000	(6.146.500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		330.000	(6.146.500)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**330.000**	**(6.146.500)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	330.000	(6.146.500)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(330.000)	3.346.500
EKUITAS AKHIR	E.5	-	**(2.800.000)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Tahun 2024 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tahun 2010 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah .

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Rencana Penyelesaian Perkara
- Peningkatan aksebilitas Putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- Peningkatan Kepatuhan hterhadap Putusan Pengadilan
- Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (peradilan)
- Pendapatan Ongkos Perkara
- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
- Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing

disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA).

Uraian	SMT I 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	31.177.000	31.177.000
Jumlah Pendapatan	**31.177.000**	**31.177.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	51.910.000	51.910.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	**51.910.000**	**51.910.000**

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp.19.625.000,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.19.625.000,- atau mencapai 63 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.31.177.000,-. Pendapatan di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berasal dari Pendapatan Negara Bukan Psajak.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan SMT I 2024

Uraian	SMT I 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	31.177.000	19.625.000	62,95
Jumlah	**31.177.000**	**19.625.000**	62,95

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 45,87% dibandingkan realisasi SMT I 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Jumlah Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan SMT I 2024 dan 2023

URAIAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
PNBP	19.625.000	13.453.500	45,87
Jumlah	**19.625.000**	**13.453.500**	**45,87**

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Negara Rp.19.295.000,-

Realisasi Belanja pada SMT I 2024 adalah sebesar Rp19.295.000,- atau 37% dari anggaran belanja sebesar Rp.51.910.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja SMT I 2024 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja SMT I 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang	51.910.000	19.295.000	37,17
Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	0	0	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	**51.910.000**	**19.295.000**	37,17
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	**51.910.000**	**19.295.000**	37,17

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

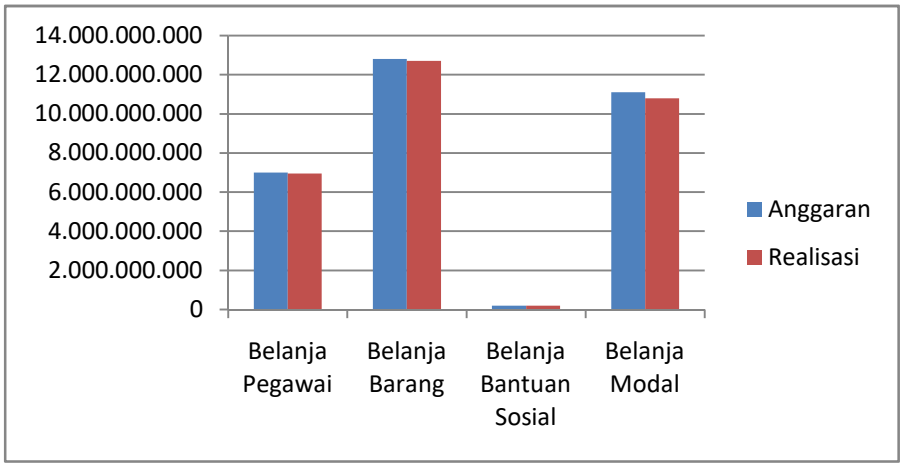

Realisasi Belanja SMT I 2024 mengalami peningkatan sebesar 14,85% dibandingkan realisasi belanja pada SMT I 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja SMT I 2024 dan SMT I 2023

URAIAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	19.295.000	16.800.000	14,85
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**19.295.000**	**16.800.000**	**14,85**

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp. 0

Realisasi Belanja Pegawai SMT I 2024 dan SMT I 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja SMT I 2024 tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena pada DIPA 005.05 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
SMT I 2024 dan SMT I 2023

URAIAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Honorarium	0	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	-	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.19.295.000

Realisasi Belanja Barang SMT I 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.19.295.000,- dan Rp.16.800.000,-. Realisasi Belanja Barang SMT I 2024 mengalami peningkatan 14,85% dari Realisasi Belanja Barang SMT I 2023.

Perbandingan Belanja Barang
SMT I 2024 dan 2023

URAIAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	5.100.000	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	8.395.000	0	#DIV/0!
Belanja Jasa	10.900.000	11.700.000	(6,84)
Belanja Pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**19.295.000**	**16.800.000**	**14,85**
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	**19.295.000**	**16.800.000**	**14,85**

Belanja Modal
Rp.0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal SMT I 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada SMT I 2024 dan 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Modal

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
SMT I 2024 dan 2023

URAIAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal SMT I 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal SMT I 2024 dan 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	SMT I 2024	2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin SMT I 2024 adalah sebesar Rp.0, Realisasi Belanja Modal SMT I 2024 dan 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
SMT I 2024 dan 2023

URAIAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal SMT I 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal SMT I 2024 dan 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	**0**	**0**	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan SMT I 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal SMT I 2024 dan 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	SMT I 2024	2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya SMT I 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal SMT I 2024 dan 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Modal.

Belanja Bantuan Sosial Rp.0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial SMT I 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal SMT I 2024 dan 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Modal

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial SMT I 2024 dan 2023

URAIAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Papua	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Biak	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.2.595.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.595.000,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	SMT I 2024	2023
Uang tunai	2.595.000	-
Rekening Bank	-	-
Kwitansi yang belum diSP2Dkan	-	
Jumlah	**2.595.000**	**-**

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan SMT I 2024 dan 2023

Keterangan	SMT I 2024	2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Kwitansi yang belum di SP2Dkan	-	
Jumlah	**-**	**-**

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasadalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas SMT I 2024dan 2023

Keterangan	SMT I 2024	2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.4 Piutang PNBP

Piutang PNBP Rp.0

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP SMT I 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR Rp.0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR SMT I 2024 dan 2023

No	Debitur per Satker	SMT I 2024	Tahun 2023
1	PTUN Palu	-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA SMT I 2024 dan 2023

No	Debitur per Satker	SMT I 2024	2023
1	PTUN Palu	-	-
Jumlah		**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar
SMT I 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp.0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka SMT I 2024 dan 2023

Jenis	SMT I 2024	2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima SMT I 2024 dan 2023

Jenis	SMT I 2024	2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp.0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan SMT I 2024 dan 2023

Persediaan	SMT I 2024	2023
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Tagihan TP/TGR Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) SMT I 2024 dan 2023

No	Debitur per Satker	SMT I 2024	2023
1	PTUN Palu	-	-
Jumlah		**-**	**-**

Tagihan Penjualan Angsuran

Rp.0

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian TPA untuk tahun 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Debitur	SMT I 2024	2023
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang SMT I 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp.0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Palu per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2024	**Rp**	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**Rp**	**-**

Peralatan dan Mesin Rp.0

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2024	**Rp**	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**Rp**	**-**

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp.0

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023		**-**
Mutasi tambah:		
Pembangunan Gedung		-
Mutasi kurang:		
Koreksi pencatatan		-
Saldo per 30 Juni 2024		**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024		-
Nilai Buku per 30 Juni 2024		**-**

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**-**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 Juni 2024	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**-**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp.0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**-**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 30 Juni 2024	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**-**

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp.0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	-	-	0	0	-
2	-	-	0	0	-
	Jumlah	**-**		**-**	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.0

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	Rp -
2	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan		**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**

Aset Tak Berwujud Rp.0

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	0
ATB Lainnya	0
	0

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2024	**Rp**	**-**
Amortisasi	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**Rp**	**-**

Aset Lain-Lain Rp.0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2024	**Rp**	**-**
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**Rp**	**-**

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	**0**	**0**	**0**
Software	0	0	0
ATB Lainnya	0	0	0
Aset Lain-lain	**0**	**0**	**0**
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp.2.595.000,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.2.595.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	SMT I 2024
1	PTUN Palu	2.595.000
Jumlah		**2.595.000**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Palu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
2	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
3	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		**Rp -**

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	-	-
Instansi Pemerintah Lainnya	-	-
Badan Lainnya	-	-
Total	**-**	

Beban yang Masih harus Dibayar Rp.72.701.000

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp.72.701.000 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar SMT I 2024 dan TA 2023

Keterangan	SMT I 2024	2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	72.701.000	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	**72.701.000**	**-**

Ekuitas Rp.0

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp. Rp.19.625.000,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.19.625.000,- dan Rp.13.453.500,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
SMT I 2024 dan 2023

URAIAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	19.625.000	13.453.500	45,87
Jumlah	**19.625.000**	**13.453.500**	45,87

Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pendapatan yang berasal dari biaya proses perkara.

Beban Pegawai Rp.0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	-	#DIV/0!
Beban Honorarium dan Vakasi	0	-	#DIV/0!
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Persediaan Rp.0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 961.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	#DIV/
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	#DIV/
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/
Jumlah Beban Persediaan	**0**	**0**	#DIV/

Beban Barang dan Jasa Rp. Rp.19.295.000,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.19.295.000,- dan Rp.19.600.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap,dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Bahan	8.395.000	7.900.000	6,27
Beban Barang Non Operasional	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Konsultan	10.900.000	11.700.000	-6,84
Beban Jasa Profesi	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**19.295.000**	**19.600.000**	-1,56

Beban Pemeliharaan Rp. 0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.242.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Perjalanan Dinas Rp.0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
SMT I 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	-	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-		
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	#DIV/0!

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
SMT I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
SMT I 2024 dan 2023

c) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Defisit Pos Luar Biasa Rp.0

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa SMT I 2024 dan 2023

URAIAN	SMT I 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Defisit LO

Rp.330.000,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar Rp.330.000,- dan Rp.(6.146.500). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk SMT I 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-lain Rp.0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas
Rp.(330.000),-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.(330.000),- dan Rp.3.346.500. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(19.625.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.295.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**(330.000)**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp.(19.625.000),- sedangkan DKEL sebesar Rp.19.295.000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan

BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	PTUN Palu	-
3	Persediaan	PTUN Palu	-
	Jumlah		**-**

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk SMT I 2024 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	PTUN Palu	Uang	Rp -
		Barang	Rp -
Total Pengesahan			**Rp -**
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			**Rp -**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker SMT I 2024 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir

Rp.0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.(2.800.000),-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu :

Satker	Jabatan	Nama
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	Kuasa Pengguna Anggaran	Hj. Sitti Junaedah, SE.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Hj. Sitti Junaedah, SE.
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Dian Puspita
	Bendahara Pengeluaran	Femianti, S.Kom
	Bendahara Penerima	Galih Azizkhan, S.IP.
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	-

Lampiran I : Penyusutan Aset Tetap

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Armortasi, Akumulasi Penyusutan/Armortasi dan Nilai Buku aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 30-06-24	Beban Peny. SMT I 2024	Akm. Peny. Per 30-06-2024	Nilai Buku Per 30-06-2024
A	**Tanah**						
1	Tanah	-	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
B	**Peralatan dan Mesin**						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	c	c	#VALUE!	#VALUE!
2	Alat Kantor	5	0	0	c	#VALUE!	#VALUE!
3	Alat Rumah Tangga	5	0	0	c	#VALUE!	#VALUE!
4	Alat Komunikasi	5	0	0	c	#VALUE!	#VALUE!
5	Komputer Unit	4	0	0	c	#VALUE!	#VALUE!
6	Peralatan Komputer	4	0	0	c	#VALUE!	#VALUE!
7	Peralatan Olah Raga	3	0	0	c	#VALUE!	#VALUE!
	Jumlah		0	-	-	#VALUE!	#VALUE!
C	**Gedung dan Bangunan**						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	c	c	#VALUE!	#VALUE!
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	c	c	#VALUE!	#VALUE!
	Jumlah		0	-	-	#VALUE!	#VALUE!
D	**Jaringan**						
1	Jaringan Listrik	40	0	c	c	#VALUE!	#VALUE!
2	Jaringan Telepon	20	0	c	c	#VALUE!	#VALUE!
	Jumlah		0	-	-	#VALUE!	#VALUE!
E	**Konstruksi dalam Pengerjaan**						
1	KDP Bangunan	4	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
F	**Aset Tetap Lainnya**						
1	Barang bercorak kesenian	4	0	c	c	#VALUE!	#VALUE!
2	Buku dan Koleksi Kepustakaan	-	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	#VALUE!	#VALUE!
Total			-	-	-	#VALUE!	#VALUE!

*) Beban amortisasi

Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No.	Uraian	Lokasi	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket.
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-

Lampiran III : Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 30 Juni 2024

No.	Nama Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah DIsahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-